

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Sejarah Kabupaten Malang

Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185-1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini

disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah.

Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkrit seperti :

1. Candi Kidal di Desa Kidal Kec. Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati.
2. Candi Singhasari di Kec. Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara.
3. Candi Jago / Jajaghu di Kec. Tumpang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana.

Pada zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 - 1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya dipimpin oleh Bupati. Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan- kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan

beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan. (malangkab.go.id)

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 km² atau setara dengan 358.486 ha dan terletak pada koordinat 112⁰17'10,90" sampai 112⁰57'00 Bujur Timur, 7⁰44'55,11" sampai 8⁰26'35,45" Lintang Selatan. Secara administratif wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT). Batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut :

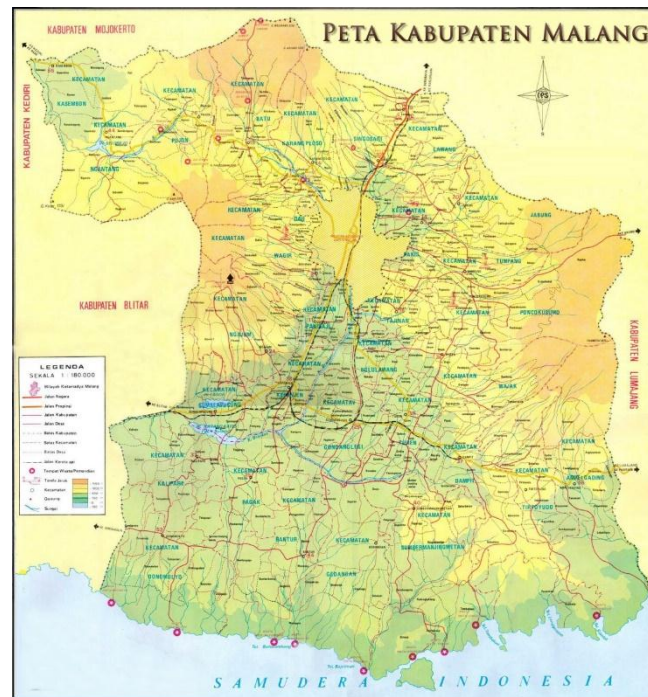
Batas Utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto

Batas Timur : Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang

Batas Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Batas Selatan : Samudra Indonesia

Bagian Tengah : Kota Malang dan Kota Batu



Gambar 3. Peta Kabupaten Malang

Sumber : malangkab.go.id, 2018

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu

wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan pariwisata.

Wilayah pesisir Kabupaten Malang bagian Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia membentang dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing wetan, Tirtoyudo sampai Ampelgading. Wilayah dengan kontur datar terletak sebagian besar di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Pagelaran, Pakisaji, Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, dan Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan Wonosari. Kawasan dengan kontur perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading, Tirtoyudo.

Kondisi Topografi dari bagian tengah Kabupaten Malang berupa dataran tinggi yang dikelilingi beberapa gunung dan dataran rendah atau lembah berada pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut (mdpl). Daerah tertinggi Kabupaten Malang terbagi pada beberapa wilayah meliputi, daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian sampai dengan 650 mdpl, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 mdpl dan daerah lereng kawi arjuno di bagian barat dengan ketinggian 500-3.300 mdpl.

c. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Malang sampai dengan Bulan Juni tahun 2018 adalah 2.818.259. Jumlah tersebut berasal dari 33 Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
TOTAL	KABUPATEN MALANG	1,420,658	1,397,601	2,818,259
1	DONOMULYO	37,189	36,684	73,873
2	PAGAK	27,823	27,971	55,794
3	BANTUR	40,880	41,689	82,569
4	SUMBERMANJING WETAN	55,051	54,445	109,496
5	DAMPIT	69,796	69,867	139,663
6	AMPELGADING	32,097	31,673	63,770
7	PONCOKUSUMO	52,379	50,538	102,917
8	WAJAK	46,777	45,796	92,573
9	TUREN	65,179	64,267	129,446
10	GONDANGLEGI	49,481	50,218	99,699
11	KALIPARE	38,384	38,322	76,706
12	SUMBERPUCUNG	32,016	31,947	63,963
13	KEPANJEN	59,147	58,394	117,541
14	BULULAWANG	37,149	37,111	74,260
15	TAJINAN	29,639	28,895	58,534
16	TUMPANG	41,079	39,903	80,982
17	JABUNG	39,203	37,179	76,382
18	PAKIS	75,690	73,541	149,231
19	PAKISAJI	47,577	46,420	93,997
20	NGAJUM	28,440	28,060	56,500
21	WAGIR	46,339	44,379	90,718
22	DAU	34,770	34,067	68,837
23	KARANGPLOSO	42,064	40,957	83,021
24	SINGOSARI	91,395	88,992	180,387
25	LAWANG	58,167	58,142	116,309
26	PUJON	36,506	34,673	71,179
27	NGANTANG	32,020	30,847	62,867
28	KASEMBON	17,611	16,592	34,203
29	GEDANGAN	30,931	30,721	61,652
30	TIRTOYUDO	36,082	35,477	71,559
31	KROMENGAN	23,097	22,998	46,095

32	WONOSARI	25,564	25,143	50,707
33	PAGELARAN	41,136	41,693	82,829

d.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun, 2018

d. Lambang, Visi dan Misi Kabupaten Malang

1) Lambang

Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki lambang sebagai identitas di daerahnya. Kabupaten Malang memiliki lambang daerah yang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Berikut ini penjelasan lambang dari Kabupaten Malang :



Gambar 4. Lambang Kabupaten Malang

Sumber : malangkab.go.id, 2018

Lambang Kabupaten Malang pada gambar diatas memiliki penjelasan pada setiap warna. Berikut ini penjelasan dari lambang Kabupaten Malang adalah

- a) Merah Putih = Perisai Segi Lima
- b) Merah = Tulisan Kabupaten Malang
- c) Kuning Emas = Garis Tepi Atap Kubah
- d) Hijau = Warna Dasar Kubah

- e) Hijau = Gunung Berapi
- f) Putih = Asap
- g) Putih dan Hitam = Keris
- h) Putih = Buku Terbuka
- i) Biru Tua = Laut
- j) Putih = Gelombang Laut (Jumlah 19)
- k) Kuning Emas = Butir padi (Jumlah 45)
- l) Putih = Bunga Kapas (Jumlah 8)
- m) Hijau = Daun Kapas (Jumlah 17)
- n) Kuning Emas = Bintang Bersudut Lima
- o) Putih dan Hitam = Pita Terbentang Dengan Sesanti Satata Gama Kartaharja
- p) Kuning Emas = Rantai (Jumlah 7)

Arti dari Lambang diatas menggambarkan jiwa nasional bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan nasional berlandaskan falsafah pancasila dilukiskan dengan perisai segi lima dengan garis tepi tebal berwarna merah putih. Kubah dengan garis tepi atapnya berwarna kuning emas dan warna dasar hijau mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani diruang lingkup daerah Kabupaten Malang yang subur makmur. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas, mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan falsafah pancasila yang luhur dan agung.

Untaian padi berwarna kuning emas, daun kapas berwarna hijau serta bunga kapas berwarna putih mencerminkan tujuan masyarakat adil dan makmur.

Daun kapas berjumlah 17 (tujuh belas), bunga kapas berjumlah 8 (delapan). Gelombang laut berjumlah 45 (empat puluh lima) mencerminkan semangat perjuangan proklamasi 17 Agustus 1945. Rantai berwarna kuning emas mencerminkan persatuan dan keadilan gunung berapi berwarna hijau mencerminkan potensi alam daerah Kabupaten Malang sedangkan asap berwarna putih mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam.

Laut mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna biru tua mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam. Keris yang berwarna hitam dan putih mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kemegahan sejarah daerah Kabupaten Malang. Buku terbuka berwarna putih mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan. Sesanti SATATA GAMA KARTA RAHARJA mencerminkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi).

2) Visi

Kabupaten Malang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”. Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh

karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

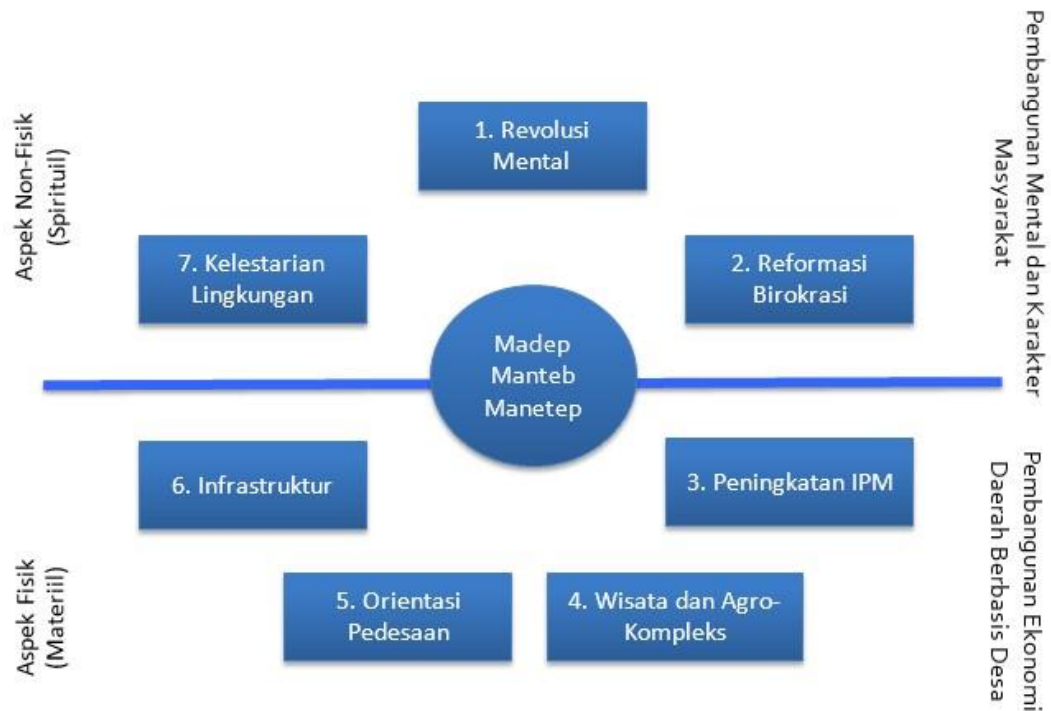
3) Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu :

- 1) Konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil.
- 2) Konsep dan arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil.



Gambar 5. Skema Misi Pembangunan Kabupaten Malang
 Sumber : Malangkab.go.id, 2018

2. Gambaran Umum Perum Perhutani

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai Visi dan Misi

perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penarapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan.

a. Sejarah Perum Perhutani

1897

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional dimulai tahun 1897 dengan dikeluarkannya “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, Staatsblad 1897 nomor 61 (disingkat “Bosreglement”) selain itu terbit pula “*Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*” (disingkat “Dienst Reglement”) yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Hutan-hutan Jati di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya afbakening (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan tata hutan.

1913

Penetapan “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, Staatsblad 1913 nomor 495, yang mengatur tentang “eksploitasi sendiri (eigen beheer) atau penebangan borong (door particuliere aannemer)”.

1927

Terbit *Bosch_Ordonnantie*, termuat dalam Staatsblad Tahun 1927 nomor 221 dan peraturan pelaksanaannya berupa *Bosch_Verordening* 1932, nama lengkap dokumen: “*Bepalingen met Betrekking Tot’s Lands Boschbeheer op Java en Madoera*” yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (den dienst van het Boschwezen).

1930

Pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan “*Djatibedrijf*” atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan). Perusahaan hutan Jati tersebut tidak berdiri lama, karena pada tahun 1938 oleh Directeur van Financien (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda) dinyatakan bahwa perusahaan yang bertujuan komersiil sebulat-bulatnya harus dihentikan, karena alasan-alasan berikut:

1. Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya berkewajiban memproduksi dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja, tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit;
2. Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak

mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar.

1940

Pengurusan hutan Jati dari “Djatibedrijf” dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (Dai Nippon), Jawatan Kehutanannya (i.c. Boschwezen) diberi nama Ringyo Tyuoo Zimusyo (RTZ), berturut-turut organisasi tersebut dimasukkan kedalam Departemen Sangyobu (urusan ekonomi, Juni 1942 – Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen Zoosenkyoku (perkapalan, November 1943 s/d pertengahan 1945) dan setelah itu di bawah Departemen Gunzyuseizanbu atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945.

1945

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

1960

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang "Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)". Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat "BPU Perhutani", termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2172.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961;

- didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur disingkat PN Perhutani Jawa Timur, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 39, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2173.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah disingkat PN Perhutani Jawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 40, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2174.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara. diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat "Perhutani".

Presiden Direktur BPU Perhutani, Anda Ganda Hidajat, pada forum Konperensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan tanggal 4 s/d 9 November 1963 di Bogor, dalam prasarannya berjudul: "Realisasi Perhutani", pada halaman 2 menulis bahwa: "Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961". PERHUTANI-PERHUTANI daerah yang telah direalisasi pendiriannya adalah :

- 1) Perhutani Djawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961;
- 2) Perhutani Djawa Tengah pada tanggal 1 Nopember 1961;
- 3) Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Djanuari 1962;
- 4) Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Djanuari 1962;
- 5) Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963”.

1972

Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972).

1978

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani. Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999,

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003.

2010

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa dan Madura oleh Perum Perhutani.

2014

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Sejak 2 Oktober 2014 tersebut Perum Perhutani ditunjuk Pemerintah selaku pemegang saham sebagai induk Holding BUMN Kehutanan dengan anak perusahaan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, PT Inhutani V. Penambahan penyertaan modal negara bagi Perum Perhutani berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara pada perusahaan PT. Inhutani I (didirikan berdasarkan PP No. 21/1972 di Kalimantan Timur), PT. Inhutani II (didirikan berdasarkan PP No. 32/1974 di Kalimantan Selatan), PT. Inhutani III (didirikan berdasarkan PP No. 31/1974 di Kalimantan Tengah), PT. Inhutani IV (didirikan berdasarkan PP No. 22/1991 di Sumatera Utara) dan PT. Inhutani V (didirikan berdasarkan PP No. 23/1991 di Sumatera Selatan).

b. Visi, Misi dan Logo Perum Perhutani

1) VISI

Menjadi perusahaan pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

2) MISI

1. Mengelola sumberdaya hutan secara lestari
2. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan
3. Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance*

3) LOGO



Gambar 6. Logo Perhutani

Sumber : Dokumen Perhutani KPH Malang, 2019

Terinspirasi dari perjalanan PERUM PERHUTANI untuk mengeksplorasi lebih jauh di luar pengelolaan kehutanan yang ada saat ini untuk senantiasa meningkatkan nilai kehutanan di Indonesia. Lingkaran JINGGA MENYALA yang berawal dari seluruh dengan panah mengarah ke atas melambangkan komitmen dan semangat seluruh jajaran PERUM PERHUTANI

untuk melakukan Transformasi dan Perbaikan terus-menerus demi mencapai VISI PERUSAHAAN. 17 lingkaran berwarna-warni melambangkan kesiapan dan kemampuan PERUM PERHUTANI untuk mengelola Hutan Indonesia secara Lestari dan Berkesinambungan. Lingkaran Biru, Hijau dan Jingga yang membentuk “Bintang Manusia” melambangkan setiap jajaran di PERUM PERHUTANI yang secara profesional bekerja bersama dengan penuh semangat mencapai tujuan Perusahaan. Tulisan PERUM PERHUTANI dengan warna coklat menggarisbawahi lambang di atasnya melambangkan ekspresi yang kuat dari komitmen PERUM PERHUTANI dalam meraih masa depan yang lebih baik dan lebih cerah sebagai perusahaan pengelola hutan secara berkesinambungan untuk kemajuan bangsa dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

3. Gambaran Umum Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang

Pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang berada di bawah manajemen Divisi Regional Jawa Timur yang secara administratif terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri serta satu Pemerintahan Kota Batu. Luas kawasan hutan 90.360,80 Ha, yang terdiri hutan produksi 46.195,90 Ha dan hutan lindung 44.164,90 Ha. Berdasarkan klasifikasi perusahaan :

1. Klas Perusahaan Jati : 40.521,3 Ha
2. Klas Perusahaan Pinus : 27.621,6 Ha
3. Klas Perusahaan Damar : 22.217,9 Ha

a. Kondisi Geografis

Perum perhutani kesatuan pemangku hutan malang terletak pada koordinat $112^0 18' - 112^0 56'$ Bujur Timur dan $07^0 30' 30'' - 08^0 27' 30''$ Lintang Selatan. KPH Malang mempunyai batas kawasan hutan yang terdiri dari :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan KPH Pasuruan
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan KPH Probolinggo,
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan KPH Blitar dan KPH Kediri.

b. Kondisi Topografi

Wilayah hutan KPH Malang dan sekitarnya beriklim tropis, yang ditandai oleh terdapatnya musim hujan dan musim kemarau yang bergantian sepanjang tahun. Terletak pada ketinggian 0 – 3.676 mdpl, dengan tipe iklim antara tipe A sampai dengan E menurut Schmidt & Ferguson. Lingkungan dengan tipe iklim ini sangat cocok untuk ditanami tegakan jenis jati dan Rimba. Temperatur rata-rata 31°C , dan curah hujan rata-rata 1226,4 mm/tahun. Wilayah KPH Malang terletak pada ketinggian 0 – 3.676 meter di atas permukaan laut, Keadaan topografi lapangan hanya sebagian kecil saja yang terletak pada dataran yang tingkat kemiringannya datar sampai landai, sebagian besar wilayahnya berada pada tingkat yang agak curam, curam dan sangat curam. Tipe B bkph dampit, sengguruh, sumbermanjing, kepanjen dan Tipe C bkph tumpang, singosari, pujon, ngantang.

Pengelolaan kawasan hutan KPH Malang dibagi menjadi dua sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH) yaitu SKPH – Malang Barat dan SKPH – Malang Timur yang terdiri dari 4 (empat) Bagian Hutan (BH), 8 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) serta 33 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Guna kepentingan kegiatan perencanaan, wilayah hutan KPH Malang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian hutan yaitu :

1. Bagian Hutan Sengguruh : 40.521,30 ha
2. Bagian Hutan Kepanjen : 16.266,20 ha
3. Bagian Hutan Tumpang : 11.355,40 ha
4. Bagian Hutan Ngantang-Pujon : 22.217,90 ha

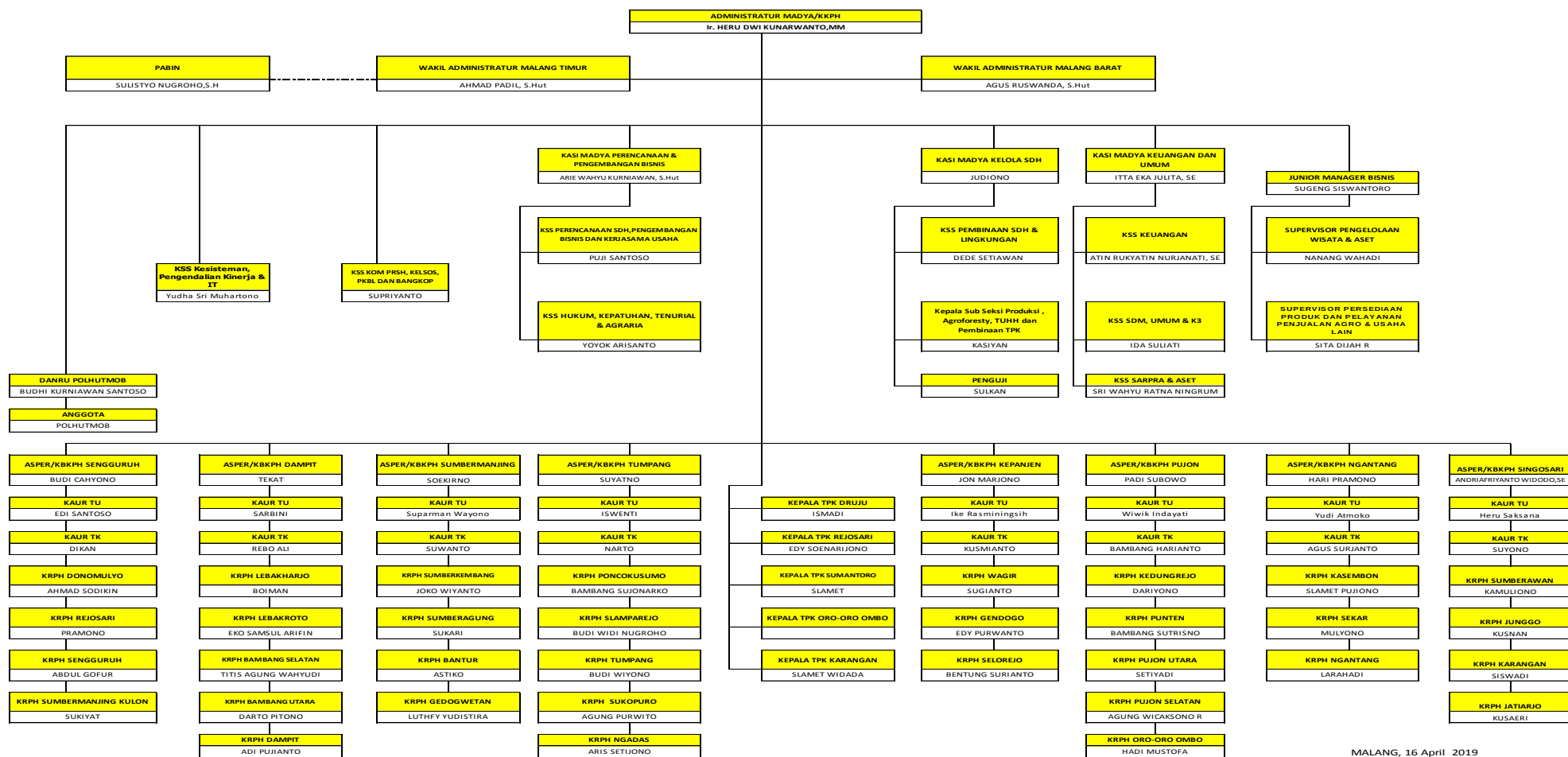
Sedangkan menurut pembagian wilayah kerja, pengelolaan hutan KPH Malang terbagi ke dalam 2 Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH), yaitu SKPH Malang Barat dan SKPH Malang Timur. Masing- masing SKPH terbagi ke dalam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH).

Tabel 8. Jumlah BKPH dan luas masing-masing wilayah

Sub SKPH Malang Timur			Sub SKPH MALANG Barat		
BKPH	RPH	Luas (Ha)	BKPH	RPH	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6
Sengguruh	1. Sengguruh	869,50	Singosari	19. Junggo	1.760,70
	2. Rejosari	787,40		20. Karangen	1.108,30
	3. SB.Manjing K	4.084,80		21. Sumberewen	2.615,10
	4. Donomulyo	3.952,10		22. Jatlarjo	830,10
Jumlah Sengguruh		9.693,80	Jumlah Singosari		6.314,20
Sumbermanjing	5. Gedog Wetan	826,10	Kepanjen	23. Selorejo	949,70
	6. Sumberkembang	6.720,10		24. Wagir	2.122,30
	7. Sumberagung	3.761,20		25. Gendogo	1.462,30
	8. Bantur	4.673,00			
Jumlah Sumbermanjing		15.980,4	Jumlah Kepanjen		4.534,70
Dampit	9. Bambang Utara	1.139,60	Pujon	26. Puntan	2.168,10
	10. Bambang Selt.	1.247,60		27. Oro-Oro Ombo	3.101,90
	11. Dampit	1.939,00		28. Pujon Selatan	5.622,50
	12. Lebaknoto	1.328,40		29. Pujon Utara	1.629,00
	13. Lebakharjo	13.206,10		30. Kedhungrejo	2.157,30
Jumlah Dampit		18.860,7	Jumlah Pujon		14.678,80
Tumpang	14. Slamparejo	1.349,70	Ngantang	31. Ngantang	4.530,50
	15. Sukopuro	1.841,60		32. Sekar	5.375,50
	16. Tumpang	1.229,10		33. Kasembon	2.760,80
	17. Ngadas	1.218,70	Jumlah Ngantang		12.667,2
	18. Poncokusumo	1.253,10	Jumlah Sub Malang Barat		38.194,90
Jumlah Tumpang		6.892,20	Jumlah Luas Allur		738,80
Jumlah Sub Malang Timur		51.427,10	Jumlah Total KPH Malang		90.360,80

Sumber : Perhutani.co.id, 2019

STRUKTUR ORGANISASI PERUM PERHUTANI KPH MALANG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO : 007/KPTS/DIR/2018 TANGGAL : 02 JANUARI 2018



MALANG, 16 April 2019
ADMINISTRATUR MADYA/ KPH MALANG

Ir. HERU DWI KUNARWANTO, MM
PHT19670601199410100

Gambar 7. Struktur organisasi Perhutani KPH Malang
Sumber : Dokumen Perhutani KPH Malang, 2019

4. Gambaran umum Perusahaan Daerah Jasa Yasa

a. Sejarah PD. Jasa Yasa

Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang merupakan salah satu perusahaan daerah dari beberapa perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Malang. Beberapa perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang antara lain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Pinjaman Pasar (BPP). Pada awal mulanya Daerah Tingkat II Kabupaten Malang hanya mempunyai sebuah Perusahaan Daerah yaitu Apotik Kabupaten yang didirikan pada bulan Juli 1969. Kemudian sesuai dengan perkembangannya, maka pada tanggal 29 Agustus 1973 didirikan Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor XI Tahun 1973 dan diperbaharui dengan Perda Nomor 12 Tahun 1993. Perusahaan Daerah Jasa Yasa tersebut memiliki beberapa unit usaha, antara lain :

1. Unit Apotik Kabupaten
2. Unit Pemandian Air Panas dan Penginapan Songgoriti
3. Unit Pemandian Dewi Sri
4. Unit Pemandian Metro
5. Unit Pesanggrahan Ngliyep
6. Unit Percetakan
7. Unit Saluran Air Minum Lawang
8. Unit Saluran Air Minum Batu
9. Unit Saluran Air Minum Kepanjen

Berdasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Malang pada tanggal 1 Juni 1981, Unit Saluran Air Minum berdiri sendiri dan berganti nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Malang No. IX Tahun 1985 Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang memiliki tambahan unit usaha, yaitu :

1. Unit Usaha Balekambang
2. Unit Usaha Pemandian Sumber Waras

Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang banyak mengelola obyek-obyek wisata di Kabupaten Malang. Sumber Daya Alam di Kabupaten Malang memiliki prospek yang baik untuk dijadikan aset yang berharga dan dapat dijadikan sumber pendapatan bagi pemerintah terutama perusahaan daerah seperti PD. Jasa Yasa Kabupaten Malang. Untuk lebih memperkenalkan obyek-obyek wisata yang dikelola oleh PD Jasa Yasa Kabupaten Malang, maka diperlukan suatu sarana yang sangat berguna sebagai usaha untuk memperkenalkan dan memberikan informasi seputar tempat-tempat wisata di kota Malang, maka pada tahun 2000 dibuka sebuah kantor penerangan pariwisata atau TIS (Tourist Information Service) PD Jasa Yasa Kabupaten Malang. TIS sendiri berada di bawah pengawasan Direksi Usaha pada Bagian Promosi dan Pengenalan. Tourist Information Service (TIS) yang telah didirikan di dekat Kantor Pusat PD Jasa Yasa Kabupaten Malang mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

1. Penyediaan brosur-brosur tempat dan obyek wisata di wilayah Malang dan sekitarnya.

2. Memberikan pekayanan berbagai macam informasi tentang tempat-tempat wisata sekaligus jalur-jalur untuk menuju obyek-obyek wisata yang akan dikunjungi.
3. Memperkenalkan dan mempromosikan kawasan atau obyek dan daya tarik wisata yang ada di wilayah Malang dan sekitarnya terutama terhadap unit-unit wisata yang berada di bawah pengelolaan PD Jasa Yasa.
4. Melakukan kerjasama dengan travel-travel biro yang ada di Malang.
5. Menunjang program pemerintah untuk memajukan bidang kepariwisataan.

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, pihak PD Jasa Yasa Kabupaten Malang melakukan berbagai kerja sama dengan pihak-pihak pemerintah, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan juga bekerja sama dengan pihak swasta. Salah satu tujuan dari pendirian PD. Jasa Yasa adalah meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang. Berpijak dari tujuan tersebut diatas bahwasannya PD. Jasa Yasa haruslah menjadi suatu perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan.

a. Visi Perusahaan Daerah Jasa Yasa

Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Malang yang sebagian besar usahanya bergerak di sektor industri pariwisata. Berkembangnya industri wisata di suatu daerah diyakini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengingat industri wisata ternyata memiliki dimensi ekonomi yang cukup luas antara lain :

1. Industri wisata mampu memberikan peluang berusaha seperti bidang akomodasi, transportasi dan industri jasa lainnya.
2. Industri wisata mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar yang berarti dapat menekan jumlah pengangguran
3. Industri wisata dapat merupakan media promosi bagi produk-produk unggulan daerah.
4. Industri wisata mampu meningkatkan pendapatan daerah di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Perusahaan Daerah Jasa Yasa

1. Sejalan dengan tugas PD. Jasa Yasa yakni memberikan pelayanan jasa khususnya dibidang kepariwisataan di samping membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka sudah sewajarnya apabila perusahaan daerah jasa yasa ikut aktif dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah khususnya sektor wisata.
2. Dengan berbekal pada potensi kepariwisataan daerah Kabupaten Malang yang cukup beragam kita harus berusaha agar wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang baik wisatawan nusantara maupun mancanegara semakin meningkat.
3. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Malang secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat.

4. Guna mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah nyata seperti pembenahan-pembenahan dan meningkatkan fasilitas pada obyek-obyek wisata yang ada, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan industri wisata.
5. Di samping itu perlu digalang kerjasama kiranya perlu digalang kerjasama antar pemerintah daerah, pengelola industri wisata dan biro-biro perjalanan wisata dalam mempromosikan potensi wisata Kabupaten Malang baik tingkat regional, nasional, maupu internasional.
6. Dengan langkah pembenahan pada obyek-obyek wisata yang ada dan promosi yang memadai kita yakin akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang.

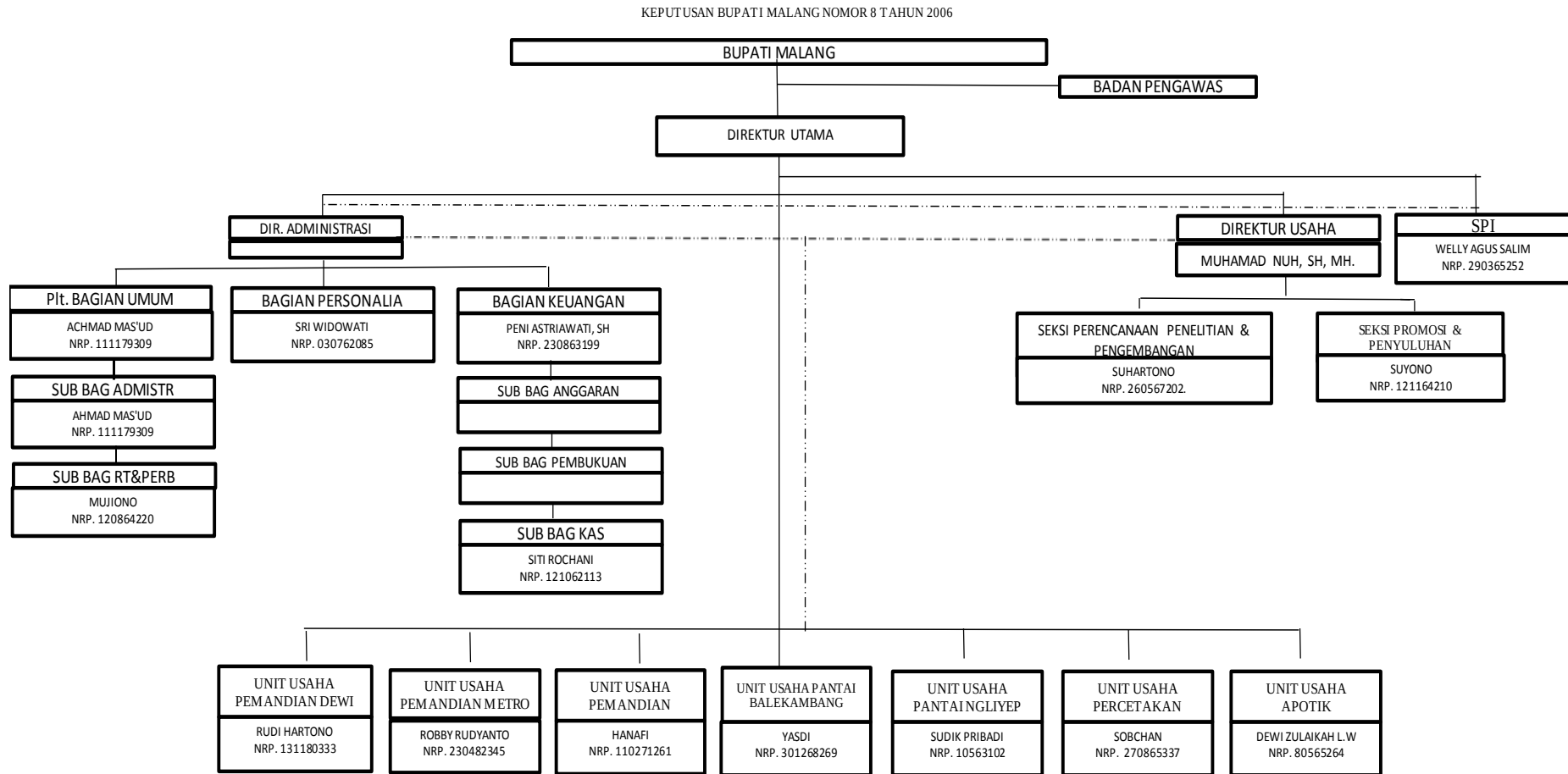
c. Sasaran

Dalam rangka mencapai misi yang telah dikemukakan diatas maka rumusan tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembenahan obyek-obyek wisata yang ada sehingga mampu menarik wisatawan baik nusantara maupun mancanegara
2. Meningkatkan kemampuan aparat pelaksana lewat pelatihan-pelatihan agar dapat bekerja lebih profesional.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek-obyek wisata yang dikelola oleh perusahaan daerah jasa yasa
2. Membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah



Gambar 8. Struktur organisasi PD. Jasa Yasa
Sumber : Dokumen PD. Jasa Yasa, 2019

5. Gambaran Umum Pantai Balekambang

a. Sejarah Pantai Balekambang

Dinamakan Pantai Balekambang karena ditengah laut ada suatu hamparan dataran yang luas dipakai untuk rapat pasukan Pangeran Diponogoro untuk menyerang pasukan Belanda maka dari itu dinamakan “Bale” karena bale yang ada ditengah laut seakan-akan mengambang maka dari itu dinamakan Pantai Balekambang. Sebenarnya Pantai Balekambang sudah dikenal warga lokal sejak tahun 1978-an. Pada tahun tersebut, seorang perangkat Desa Srigonco membuka akses jalan sehingga orang dari luar desa tersebut lebih mudah mencapai Balekambang. Lima tahun kemudian, Pantai Balekambang diresmikan oleh Bupati Malang yang saat itu bertugas, Bapak Eddy Slamet. Semenjak itu, nama Pantai Balekambang makin bergaung. Keindahan yang ditawarkannya cukup menarik wisatawan sehingga terus berkembang dan kini menjadi salah satu andalan wisata pantai di Kabupaten Malang.

Konon, orang yang pertama membuka hutan di Pantai Balekambang bernama Syaikh Abdul Jalil, seorang ulama yang dipercaya berasal dari Yogyakarta. Saat ini, makam Syaikh Abdul Jalil yang berlokasi sekitar 1 kilometer dari Pantai Balekambang, rajin diziarahi oleh umat muslim dari berbagai daerah. Pada bulan Suro/Muharram, jumlah jamaah yang berkunjung baik untuk memperingati tahun baru hijriyah maupun wisatawan biasa yang ingin menyaksikan prosesi ‘Suroan’ melonjak. Pada hari Raya Nyepi, pantai ini juga lebih ramai dari hari-hari biasa karena umat Hindu

melakukan upacara atau prosesi di Pura Amarta jati yang terletak di Pulau Ismoyo. Pulau Ismoyo sendiri adalah bagian dari pulau-pulau kecil di Balekambang yang menjorok ke lautan dan dihubungkan dengan sebuah jembatan ke daratan.

b. Keunikan dan Potensi Pantai Balekambang

Pantai Balekambang memiliki luas 10,2 hektar dengan jenis pantai memanjang, berpasir putih, terdapat pura, banyak pohon untuk berteduh, hawa sejuk, memiliki 3 pulau yaitu Pulau Ismoyo (pura), memiliki tradisional upacara sesaji 1 suro pada bulan suro oleh masyarakat Desa Srigonco dan sekitarnya, adanya upacara Jalani Dipuja yang dilaksanakan oleh umat Hindu dari Bali, Malang Raya, Pasuruan yang berjumlah sekitar 20.000 pada hari Raya Nyepi, Selain itu juga terdapat potensi berupa ikan gurita yang diambil oleh para nelayan pada saat surut yaitu setelah ashar.



Gambar 9. Terdapat Jembatan yang menghubungkan ke Pulau Ismoyo (Pura)

Sumber : Dokumen peneliti, 2019

c. Sarana dan Prasarana Pantai Balekambang

Selain memiliki keunikan tersendiri, Pantai Balekambang mempunyai berbagai macam sarana dan prasarana untuk menunjang wisatawan dalam berwisata. Adanya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai dalam suatu objek wisata dapat memberikan nilai lebih pada objek wisata tersebut. Adapun sarana dan prasarana Pantai Balekambang terdiri dari :

1. Jalan beraspal
2. Lahan parkir
3. *Camping ground*
4. Kamar mandi dan toilet
5. Penginapan pondok bambu
6. Cafe wibisono dan cafe balekambang
7. Rumah baca
8. Kios makanan dan minuman
9. Gazebo
10. Tempat *selfie* dan ayunan
11. Persewaan tenda

d. Kelemahan Pantai Balekambang

Pantainya kurang bersih karena kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah.

e. Kelebihan Pantai Balekambang

1. Pantai primadona Jawa Timur terutama Kabupaten Malang
2. Pantai yang memiliki banyak pengunjung
3. Tradisi tahun baru yang diciptakan oleh pengunjung dengan pesta kembang api yang ditaruh di pura kemudian mengalami perkembangan bahwa pengunjung yang membawa mobil atau sepeda motor untuk menyalakan lampu dan mesin secara bersama-sama pada pukul 00.00 kemudian ada masukan dari pengunjung taun sekarang harus lebih baik dari tahun sebelumnya maka ada perkembangan berupa penyediaan *lighting* yang menjadikan pura pada malam hari itu hidup jadi seakan-akan mengambang ditengah laut.
4. Pantainya bisa dipakai berenang di dekat pura yaitu Pulau Ismoyo karena pura itu merupakan pemecah ombak jadi aman
5. Terdapat sungai, air tawar, yang bisa dipakai berenang dan mandi anak-anak

B. Penyajian data fokus penelitian

1. Kolaborasi Antar Aktor dalam Manajemen Pariwisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang

1) Adanya pertukaran informasi yang saling menguntungkan

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia karena setiap manusia pasti terlibat dalam komunikasi. Adanya komunikasi maka manusia dapat saling berhubungan antara satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari baik di tempat kerja, di kampus, di rumah, dalam masyarakat atau dimanapun manusia berada. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia secara individu, kelompok, maupun dalam organisasi. Melalui informasi dan pesan yang disampaikan melalui proses komunikasi seseorang yang tadinya tidak mengetahui informasi menjadi mengetahui dan menjadi lebih paham pesan yang akan disampaikan. Komunikasi dalam organisasi memiliki kompleksitas yang tinggi karena terlibat dengan berbagai macam sekelompok manusia dan bagaimana cara menyampaikan informasi dan menerima informasi bukan hal yang mudah dan menjadi tantangan dalam proses komunikasinya.

Aliran informasi dalam komunikasi antar organisasi merupakan proses yang rumit, karena melibatkan seluruh bagian yang ada dalam organisasi. Informasi tidak hanya mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga sebaliknya dari bawah ke atas dan juga mengalir diantara sesama anggota organisasi. Untuk membentuk kerjasama yang baik antara organisasi dan para anggota, maka dibutuhkan bentuk hubungan serta komunikasi yang baik

antara para anggota organisasi. Organisasi tidak mungkin berada tanpa komunikasi. Apabila tidak ada komunikasi, koordinasi kerja tidak mungkin dilakukan dengan baik.

Kabupaten Malang memiliki berbagai macam destinasi wisata alam. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang yang paling menonjol adalah pantai karena jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan wisata alam lainnya. Tentunya dalam pengelolaan wisata tersebut melibatkan berbagai kelompok orang dan terdapat pertukaran informasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yasdi selaku Ketua Unit Pelaksana Perusahaan Daerah Jasa Yasa Pantai Balekambang yaitu :

“Ya tentu ada pertukaran informasi mbak kalau Balekambang sendiri sama Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) itu kan bekerjasama dalam hal pelaksanaan aja jadi pelaksanaan biar sama-sama berjalan terkait sama pengelolaan itu bersama-sama. Terkait sama penggalan tiket jadi satu tempatnya itu aja. Jadi, birokrasinya sendiri-sendiri. Balekambang dibawah naungan PD. Jasa Yasa Kalau LMDH dibawah naungan Perhutani. Setiap hari Senin kita pasti laporan ke PD. Jasa Yasa. Hasil penjualan atau pengoperasian 1 minggu kita laporkan ke pihak PD. Jasa Yasa begitu juga dari koordinator wisata itu setiap 1 minggu atau 1 bulan itu pelaporannya ke Perhutani sendiri”. (wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 pukul 12.43 WIB).

Pernyataan ini didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Nyarimin selaku koordinator wisata Pantai Balekambang. Berikut ini pernyataannya :

“Terkait pertukaran informasi kita hanya koordinator lapangan penjualan tiketnya aja. Pengadaan, bagian pemasaran tiket dari KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) kita cuma pelaksana di lapangan aja. Kalau saya informasi soal penjualan tiket tiap bulan saya setor langsung ke BKPH

Sengguruh. Selain itu saya juga menginformasikan tentang keamanan lingkungan sekitar wisata”. (Wawancara pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 11.06 WIB).

Pernyataan ini didukung berupa surat perjanjian kerjasama pengelolaan wisata pantai antara Perum Perhutani dengan LMDH Wananadi Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Pasal 5 Nomor 4 tentang Tata Cara Operasional Pengelolaan bahwa Setiap bulan PIHAK KEDUA melaporkan dan menyerahkan hasil pendapatan pengelolaan wisata pantai kepada PIHAK PERTAMA melalui Pejabat/Petugas yang sudah ditunjuk.

Hasil wawancara dan surat perjanjian kerjasama diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah manajemen pariwisata di Pantai Balekambang terdapat sebuah proses pertukaran informasi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pihak Pertama yaitu pimpinan yang berada dikantor dan Pihak Kedua yaitu pelaksana lapangan dan koordinator wisata di Pantai Balekambang dimana kedua belah pihak saling menginformasikan kepada pimpinan.

2) Adanya pertukaran kegiatan

Selain terdapat pertukaran informasi, dalam sebuah organisasi terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan tersebut bisa melibatkan berbagai macam organisasi baik itu organisasi formal maupun nonformal. Kegiatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang salah satunya yaitu kegiatan kebersihan dan pengamanan laut agar para wisatawan merasa aman

dan nyaman. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yasdi selaku Ketua Unit

Pelaksana Perusahaan Daerah Jasa Yasa Pantai Balekambang yaitu :

“Yang namanya tempat wisata kan butuh pengamanan karena kita 1 lokasi dan 1 wilayah biarpun namanya Pantai Regent dan Pantai Balekambang kan tetep 1 lokasi kita tetap berkolaborasi dan kerjasama tentang pengamanan pantai maupun yang ada di daratan misal di daratan wilayah balekambang itu ada suatu kejadian di LMDH pun ikut bekerjasama dan untuk biaya kita tanggung bersama seperti kecelakaan dilaut karena kita setiap *event* tertentu seperti di hari raya, liburan sekolah, tahun baru itu kita menggunakan 1 tim yang namanya tim kesehatan atau tim SAR untuk menolong dilaut. Jadi jasa yasa dan lembaga punya tim SAR sendiri akan tetapi dengan adanya event besar seperti lebaran dan tahun baru itu kan memerlukan tim medis, perahu penolong kita mendatangkan dari 1 unit/1 tim dari PMI kabupaten malang.” (Wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 pukul 12.43)

Penjelasan tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi selaku koordinator lapangan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wononadi :

“Kalau kegiatan disini ini seperti keamanan dan kebersihan itu kita adakan setiap hari karena yang namanya tempat wisata kan butuh pengamanan untuk menjaga keselamatan wisatawan yang berwisata kesini. Selain keamanan kita juga ada kegiatan bersih-bersih agar wisata disini itu nyaman lah di lihat gitu tidak kotor”. (Wawancara pada hari Sabtu 13 Juli 2019 pukul 10.45)

Wawancara diatas didukung dengan dokumen berupa Surat Perintah Komando Distrik Militer 0818 Komando Rayon Militer 0818/12 yaitu :

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 2 / VI / 2019

Menimbang : Bahwa untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pengamanan pantai Wisata Balaikambang di wilayah Koramil 0818/12 Bantul, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Pertimbangan Danramil dan staf Koramil 0818/12 Bantul ; dan
2. Program Kerja Koramil 0818/12 Bantul TA. 2019

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama. Pangkat, korps, NRP dan jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab sehari-hari masing-masing agar melaksanakan pengamanan di Pantai Wisata Balaikambang Wilayah Koramil 0818/12 Bantul.

2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 S.d 12 Juni 2019 pukul 08.00 Wib s.d 16.00 WIB di Pantai Wisata Balaikambang wilayah Koramil 0818/12 Bantul.

3. Pakaian menggunakan PDL, Baret, dan Rompi.

4. Melaporkan kepada Danramil 0818/12 Bantul atas pelaksanaan surat perintah ini.

5. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 05 Juni 2019

Tembusan

- Batituud Ramil 0818/12Bantur

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertukaran kegiatan yang bertujuan untuk pengamanan para wisatawan dan kebersihan di lokasi wisata agar para wisatawan merasa nyaman. Kegiatan tersebut dilakukan oleh PD. Jasa Yasa melalui Tim SAR (*Search And Rescue*) yang didatangkan dari koramil 0818/Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan Perhutani melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wononadi dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan dan kegiatan keamanan.

3) Adanya berbagi sumber daya

Sumber daya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang atau suatu organisasi berupa materi atau unsur lain dalam suatu kehidupan. Sumber daya dapat berupa barang dan jasa. Setiap sumber daya memiliki kegunaan tersendiri seperti sumber daya manusia berupa tenaga kerja, wawasan, bantuan, teknologi, keahlian. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yasdi selaku Ketua Unit Pelaksana Perusahaan Daerah Jasa Yasa Pantai Balekambang yaitu :

“Untuk pengelolaan wisata yang ada di Pantai Balekambang ini kan kita kolaborasi disamping itu ada sistem modifikasi kita meniru kita praktekan di lapangan. Misalnya kita saat ini kan gencar untuk pengelolaan wisata tempat wisata supaya menarik pengunjung kayak tempat selfie ya, kita studi banding atau berkunjung mungkin ke Bali setelah kita hasil riset disana ada yang bisa diterapkan di Pantai Balekambang disini kita terapkan. Ya kayak tempat selfie itu seperti ayunan, tulisan Never Ending

Balekambang di pintu masuk”. (Wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 pukul 12.43)

Pernyataan tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara oleh Bapak Budi Cahyono selaku asisten Perhutani BKPH Sengguruh :

“Tujuan utama dari kerjasama ini kan yang saling menguntungkan nah menguntungkan disini seberapa besar kontribusi masing-masing pihak. Perhutani punya lahan, Perhutani punya kewenangan untuk mengelola, Perhutani berkewajiban untuk membayar pbb, masyarakat lewat LMDH dia punya sumber daya tenaga kerja terus melakukan operasional di lapangan mulai dari penjagaan loket terus kebersihan dilakukan dan yang melaksanakan itu LMDH, Perhutani mencetak karcis ke Bappenda, nah dari situ ada pembagian hasil salah satunya tiket, bagi hasil ke LMDH juga karena salah satu sumber pendapatan LMDH.” (Wawancara pada hari Kamis 11 Juli 2019 pukul 09.35)

Penjelasan tersebut didukung dengan data Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan wisata antara Perum Perhutani dengan LMDH Wananadi Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang nomor 110/044.1/PKS-WST/MLG/DIVRE-JATIM/2017 Pasal 6 tentang ketentuan bagi hasil pengelolaan ayat 3 yang berbunyi :

PASAL 6

KETENTUAN BAGI HASIL PENGELOLAAN

(3) Penerimaan bagi hasil dari pendapatan pengelolaan kerjasama berdasarkan perjanjian ini diatur sebagai berikut ;.....

- 3.1 PIHAK PERTAMA : Sebesar 31%
- 3.2 PIHAK KEDUA : Sebesar 31%. Belum dikurangi PPH 5%
- 3.3 Pajak Daerah (Porporasi) : sebesar 20%
- 3.4 Mitra Kelola : Sebesar 18%. Belum dikurangi PPH 5%
 - 3.4.1 Tim Pengembangan Usaha KPH Malang : Sebesar 2,5%
 - 3.4.2 Tim Pengembangan Usaha BKPH Sengguruh : Sebesar 2,5 %
 - 3.4.3 Tim SAR : Sebesar 2%

3.4.4 Desa	: Sebesar 4%
3.4.5 Muspika	: Sebesar 3%
3.4.6 Primkopkar KPH Malang	: Sebesar 2%
3.4.7 Biaya Pengembangan wisata (cadangan investasi) dan biaya koordinasi dan santunan sosial	: Sebesar 2%

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa adanya berbagi sumber daya oleh para aktor dari PD. Jasa Yasa dan perhutani berupa potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi yaitu materi atau unsur lain dalam kehidupan manusia. Seperti dalam lingkup internal PD. Jasa Yasa berbagi sumber daya dengan cara melakukan studi banding ke Pulau Bali untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meniru dalam hal pengelolaan wisata seperti menambah fasilitas tempat *selfie* bagi para wisatawan agar tertarik untuk berkunjung ke Pantai Balekambang. Selain itu, dari pihak Perhutani berbagi sumber daya dengan cara melakukan kerjasama dan bagi hasil dengan masyarakat sekitar Desa Srigonco yang memiliki sebuah lembaga dinamakan LMDH Wononadi yang merupakan salah satu sumber pendapatan mereka.

4) Meningkatkan kapasitas orang lain untuk mencapai tujuan bersama

Pembangunan kapasitas merupakan serangkaian strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja sektor publik dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kapasitas berkaitan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kearifan lokal di suatu wilayah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yasdi selaku Ketua Unit Pelaksana Perusahaan Daerah Jasa Yasa Pantai Balekambang yaitu :

“Untuk meningkatkan kapasitas ini karena kita pengelola Pantai Balekambang perlu adanya peningkatan sumber daya manusia karena keterbatasan suatu misal mengadakan pertemuan atau rapat diantara warung-warung. Mungkin dari warung-warung sendiri karena merasa ikut memiliki Pantai Balekambang itu memberi masukan untuk balekambang sendiri bisa dipandang dan dinikmati pengunjung nyaman, memberi masukan peningkatan pengelolaan seperti sosialisasi rapat internal dari pedagang, dari PKL itu kita programkan setelah liburan sekolah. Sebenarnya kita punya program 1 bulan kemaren akan tetapi dengan adanya liburan secara teknis belum bisa dilaksanakan karena dari masing-masing pedagang mungkin sibuk melayani pengunjung yang beli di masing-masing warungnya. Paling tidak 1 tahun kita adakan 2x atau 3x setiap kita mau mengadakan event tertentu mungkin persiapan hari raya, persiapan 17 agustus itu kita kolaborasi bagaimana balekambang dikemas nuanasa 17 agustus 2019 nanti kita adakan jadi melibatkan masyarakat.”. (Wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 pukul 12.43)

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Dikan selaku kepala urusan kehutanan dari Perhutani :

“Terkait dengan kapasitas ini perhutani mempunyai amanah mbak dari pemerintah pusat salah satunya tentang sosial maksudnya yaitu tidak boleh egois dalam artian kita harus membantu masyarakat sekitar. Waktu dulu kan kita mengelola pantai itu sendiri mbak, dalam arti tidak ada campur tangan dari berbagai pihak. Maka dari itu Perhutani mengajak kerjasama dengan masyarakat sekitar tahun 2006 itu dan sekarang mereka udah memiliki wadah dengan membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wononadi ya sumber daya manusianya sudah lumayan lah dengan adanya pembinaan dari kita seperti pembinaan untuk mengelola pantai misalnya ranting pohon yang sudah waktunya ditebang agar tidak membahayakan wisatawan maka ditebang, kebersihan di lokasi wisata, pendapatan tiket kan kita juga bagi hasil dengan mereka”. (Wawancara pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 09.35).

Penjelasan dari wawancara diatas dipertegas dengan adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang perum perhutani pasal 7 nomor 7 yang menjelaskan bahwa :

Upaya melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan, pelayanan, bantuan teknik, pendidikan, dan/atau pelatihan;
- b. Menyebarluaskan informasi mengenai proses Pengelolaan Hutan kepada masyarakat secara terbuka; dan
- c. Melindungi masyarakat dalam berperan serta pada pelaksanaan Pengelolaan Hutan, antara lain memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan usul dari masyarakat dalam rangka Pengelolaan Hutan sepanjang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka perlindungan hutan.

Penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas orang lain, pihak dari PD. Jasa Yasa melakukan kerjasama bersama masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi dan memberi masukan untuk pengelolaan Pantai Balekambang terkait pedagang dan PKL agar semakin baik dan diminati oleh para pengunjung . Selain itu, dari pihak Perhutani melakukan pembinaan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wononadi seperti pembinaan terkait dengan kebersihan dan keamanan pantai.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kolaborasi Antar Aktor Dalam Manajemen Pariwisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang

Setiap proses kolaborasi pasti mempunyai dukungan atau hambatan dalam pelaksanaannya karena yang namanya berkolaborasi dengan orang lain tentu saja menyatukan berbagai pikiran atau pendapat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

1) Faktor internal

a) Faktor program kerja Pemerintah Kabupaten Malang

Pemerintah dalam menjadi pemimpin tentunya memiliki tujuan atau program-program yang ingin diwujudkan agar daerah tersebut bisa maju. Kabupaten Malang terkenal dengan wisata pantai karena keunikannya serta jumlah pantai dominan lebih banyak daripada wisata alam lainnya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Malang meresmikan dengan membentuk sebuah *event* yaitu *Malang Beach Festival* (MBF) untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Malang agar semakin maju dan terkenal. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dikan selaku kepala urusan kehutanan dari Perhutani :

“Kabupaten malang punya program kerja salah satunya ya peningkatan pariwisata yang secara tidak langsung perhutani terdorong oleh kondisi seperti itu untuk meningkatkan apresiasi setiap tahun ada *event* *Malang Beach Festival*”. (Wawancara pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 09.35)

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Bapak Suyono selaku seksi promosi Pantai Balekambang :

“Sejak tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Malang mengadakan sebuah event tahunan yang disebut dengan Malang *Beach* Festival dimana event itu dipusatkan di berbagai pantai yang berada di Kabupaten Malang. Itu kayak lomba gitulo mbak ya lombanya macam-macam kalau yang di Pantai Nganteb itu seperti lomba selancar terus kalau di Pantai Balekambang ini lomba fashion show yang diikuti oleh masyarakat sekitar sini. Tentunya ya untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Malang. Jadi intinya Malang Beach Festival ini lomba yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dimana tempat lombanya itu dilaksanakan di berbagai macam pantai yang ada di Kabupaten Malang ini”. (Wawancara pada hari kamis 18 April 2019 pukul 08.45 WIB).

Pernyataan dari Bapak Suyono tersebut sesuai dengan misi Kabupaten Malang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bab v penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu :

“Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata”

Program kerja sangatlah penting untuk membuat patokan atau tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Kegiatan Malang *Beach* Festival sudah ada sejak tahun 2017 dan event itu akan terus berlanjut. Hal tersebut untuk mempromosikan wisata pantai khususnya di Kabupaten Malang agar diketahui oleh masyarakat luas baik itu dalam negeri maupun luar negeri.

b) Faktor aktor

Aktor merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan. Terdapat berbagai aktor dalam mengelola di wisata Pantai Balekambang yaitu perusahaan daerah milik pemerintah Kabupaten Malang yang dinamakan PD. Jasa Yasa dan Perhutani. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Ruswanda selaku wakil administratur KPH Malang :

“Perhutani ini kan memiliki 3 amanah dari pemerintah pusat yaitu sosial untuk membantu masyarakat sekitar, ekologi untuk menjaga agar kawasan hutan tidak gundul serta ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan karena Perhutani merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Nah, karena di Pantai yang berada di Kabupaten Malang itu merupakan wilayah hutan kami, maka kami berhak untuk mengelolanya dan tentunya Perhutani bekerjasama dengan masyarakat disana yang disebut dengan LMDH”. (Wawancara pada hari Kamis 4 April 2019 pukul 12.50 WIB).

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Yasdi selaku Ketua Unit Pelaksana PD. Jasa Yasa Pantai Balekambang yaitu :

“Untuk di Pantai Balekambang ini ada 2 pengelola yang pertama yaitu PD. Jasa Yasa Unit Balekambang ini, secara otomatis dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam arti pemilik Pantai Balekambang berarti Bupati Kabupaten Malang. Jadi, Perusahaan Daerah Jasa Yasa ini dikelola dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Malang (Perusahaannya Kabupaten Malang) dan yang ke 2 yaitu ada Perhutani yang bekerjasama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)”. (wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 pukul 12.43)

Wawancara diatas didukung dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 87 Tahun 1993 Tentang Penyerahan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Kolam Renang di Sanggar Bhakti Pramuka Lawang dan Pantai Wisata “Balekambang” Bantur dalam pasal 2 ayat (1) yang berisi :

“Perusahaan Daerah Jasa Yasa berhak mengatur lebih lanjut berdasarkan manajemen perusahaan, dengan mempertimbangkan kelayakan tarip dan pentahapan peningkatannya secara wajar, dengan memperhatikan pula fungsi pelayanan, pendidikan, dan motivasi bagi pengunjung/wisatawan”.

Aktor dalam mengelola wisata Pantai Balekambang yaitu PD. Jasa Yasa yang memiliki kantor di dalam wisata Pantai Balekambang yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Balekambang dan ada Perhutani yang bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Hal tersebut akan memberikan keuntungan karena pengelola yang terlibat lebih dari 1 pihak.

c) Faktor Geografis

Berada di daerah dataran tinggi dan pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan samudera menjadikan wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang memiliki keindahan alam yang mempesona. Keindahan alam itu berupa sungai, perbukitan, hutan, flora, fauna, samudra hindia yang membentang di wilayah selatan Kabupaten Malang. Hal tersebut menjadikan salah satu penentu agar daerah ini khususnya Pantai Balekambang dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata pantai dengan berbagai macam potensi. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Suyono selaku seksi promosi Pantai Balekambang :

“Kabupaten Malang ini kan termasuk dataran tinggi selain itu juga suhunya disini ya lumayan dingin. Terus pantai di Kabupaten Malang ini kan banyak dan terdapat keunikan tersendiri khususnya Pantai Balekambang yang mempunyai pura itu. Hal tersebut kan bisa menjadi daya tarik sendiri mbak bagi pengunjung”. (Wawancara pada hari Kamis 18 April 2019 pukul 08.45 WIB).

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada wisatawan Pantai Balekambang bernama Bapak Viki Prasetya :

“Saya asli Sragen mbak tetapi saya sudah 15 tahun hidup di Malang. Ya karena suasananya yang nyaman dengan suhu yang tidak panas. Apalagi saya suka kalau main sama teman atau keluarga ke Pantai ini (Balekambang) karena pantainya bagus mbak ada puranya. Lalu disini kan juga banyak ikan seperti cakalang, cumi-cumi. Biasanya saya bakar sendiri sambil *camping* sama teman-teman”. (Wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 pukul 13.35 WIB).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah yaitu : Topografi Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di wilayah selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kondisi topografis dataran tinggi yang dikelilingi beberapa gunung dan dataran rendah atau lembah berada pada ketinggian 250- 500 meter dari permukaan laut (dpl) terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi terbagi pada beberapa wilayah meliputi, daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian sampai dengan 650 meter dpl, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat dengan ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Keadaan geografis Kabupaten Malang dapat membuat daya tarik bagi wisatawan. Berada pada dataran tinggi, serta dikelilingi dengan beberapa gunung, suhu yang lumayan tidak panas serta terdapat berbagai macam keanekaragaman potensi pantai. Hal tersebut dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke pantai

di Kabupaten Malang khususnya Pantai Balekambang yang memiliki keunikan karena terdapat pura.

2) Faktor eksternal

a) Faktor tradisi masyarakat

Animo masyarakat pada jaman sekarang berwisata seperti kebutuhan untuk *refresing* atau ingin sekedar mengetahui Pantai Balekambang yang satu-satunya memiliki pura dibandingkan dengan pantai yang lainnya. Hal tersebut dapat mendongkrak pendapatan pemerintah untuk terus mengembangkan pariwisata agar lebih baik. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Suhartono selaku seksi penelitian jumlah wisatawan Pantai Balekambang :

“Sebenarnya Pantai Balekambang ini menang banyak mbak dalam artian dapat menarik animo masyarakat secara luas karena terkenal adanya pura di tengah pantainya. Masyarakat yang berkunjung tidak hanya dari Malang namun juga ada yang dari Bali, Pasuruan, atau luar provinsi juga pernah. Biasanya mereka kesini itu ada upacara Jalani Dipuja yang dilaksanakan oleh umat Hindu pada hari raya Nyepi. Umatnya yang berkunjung sekitar 20.000an. Tentu saja itu kan dapat membuat pendapatan disini semakin meningkat”. (Wawancara pada hari Jumat 19 April 2019 pukul 08.17 WIB).

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Bapak Suyono selaku seksi promosi Pantai Balekambang :

“Setiap malam pergantian tahun di Pantai Balekambang ini selalu ramai mbak karena disini ada tradisi yang diciptakan oleh masyarakat sendiri. Dikatakan tradisi masyarakat karena ide dari masyarakat sendiri agar malam pergantian tahun di Pantai Balekambang ini berkesan. Setiap tahun masyarakat selalu memberikan kritik dan saran kepada kami agar tahun berikutnya dapat lebih baik. Dulu kita merayakan hanya dengan kembang api saja. Tahun ini 2019 kita membuat Pulau Ismoyo yang ada puranya itu seakan-akan hidup pada malam hari dengan cara kita beri *lighting*. Jadi, bisa dikatakan sebenarnya ini itu tradisi dari masyarakat sendiri untuk menghabiskan malam tahun baru di Pantai Balekambang ini”. (Wawancara pada hari Kamis 18 April 2019 pukul 08.45 WIB)

Tradisi upacara Jalani Dipuja dan tradisi pergantian tahun tersebut dapat menarik animo masyarakat untuk berkunjung. Selain untuk ibadah, berwisata, atau sekedar ingin mengetahui tradisi yang ada di Pantai Balekambang. Masyarakat tersebut tidak hanya dari Malang Raya namun juga banyak yang dari Bali, Pasuruan atau luar provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan jumlah pendapatan.

b) Faktor sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia untuk mengelola pariwisata sangat penting dalam upaya pengembangan sektor pariwisata. Tentu saja peran bukan hanya dari pemerintah saja namun juga dari peran masyarakat. Masyarakat dapat berperan langsung sebagai penyedia sarana penunjang objek wisata seperti rumah makan, penginapan, toilet, tempat berbelanja dan cinderamata khas dari daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Ibu Satumi sebagai pemilik warung disekitar Pantai Balekambang :

“Kita dulu disini mendirikan warung ya hanya jualan makanan dan minuman mbak. Lalu, kita menjual cinderamata karena itu biasanya yang dicari wisatawan apalagi kalau luar kota. Maka dari itu kami ya membuat cenderamata berbahan dasar hasil laut disini seperti kerang untuk hiasan dinding, rumput laut untuk gantungan kunci. Hasilnya ya lumayan mbak”. (Wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 pukul 13.35 WIB).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Yasdi selaku Ketua Unit Pelaksana PD. Jasa Yasa Pantai Balekambang yaitu :

“Namanya tempat wisata ini kan perlu sesuatu yang baru artinya misalnya sekarang kesana kondisinya seperti itu. Nah, 2 atau 3 bulan lagi tetap seperti itu kan orang tidak akan tertarik maka perlu adanya inovasi sarana atau prasarana baru seperti spot selfie dan ayunan”. (Wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 pukul 12.43)

Adanya kreatifitas atau inovasi untuk mengembangkan tempat wisata menjadi lebih baik, bagus, dan menarik untuk dikunjungi dapat menjadikan faktor pendukung. Seperti membuat cenderamata yaitu gantungan kunci berbentuk kerang laut, pernak-pernik kerudung, tempat tissue dengan hiasan kerang, pigora, tempat cermin dan membangun fasilitas pendukung di tempat wisata seperti spot selfie. Hal tersebut dapat mendorong para wisatawan untuk terus berkunjung ke Pantai Balekambang.

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Kolaborasi Antar Aktor dalam Manajemen Pariwisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang

a. Adanya pertukaran informasi yang saling menguntungkan

Pengelolaan pariwisata pada dasarnya memerlukan keterlibatan berbagai aktor dalam mengelola. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryo (2013:77) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah koordinasi. Adanya koordinasi melalui pertukaran informasi dan pesan yang disampaikan maka proses komunikasi seseorang yang tadinya tidak mengetahui informasi menjadi mengetahui dan menjadi lebih paham pesan yang akan disampaikan. Wisata Pantai Balekambang dikelola oleh PD. Jasa Yasa dan secara teknis dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Balekambang yang tempatnya berada pada lokasi wisata. Selain itu yang terlibat adalah Perhutani yang secara teknis dilaksanakan oleh koordinator wisata serta petugas lapangan yang bernama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Para

pengelola tersebut tentunya memerlukan sebuah proses dan pertukaran informasi agar terjadi koordinasi yang lebih baik. Seperti informasi kunjungan wisatawan dan informasi tentang keamanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 9. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pantai Balekambang
Tahun 2018-2019**

No.	Bulan	Tahun	Jumlah kunjungan
1.	Januari	2018	51.011
2.	Februari	2018	27.100
3.	Maret	2018	30.685
4.	April	2018	35.281
5.	Mei	2018	24.184
6.	Juni	2018	114.044
7.	Juli	2018	70.950
8.	Agustus	2018	14.697
9.	September	2018	26.766
10.	Oktober	2018	21.434
11.	November	2018	28.906
12.	Desember	2018	57.978
13.	Jumlah		503.036
14.	Januari-Juli	2019	244.000

Sumber : Dokumen PD. Jasa Yasa, 2019

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa kedatangan para wisatawan ke Pantai Balekambang setiap bulan jumlahnya tidak tetap artinya perubahan jumlah wisatawan tidak selalu mengalami kenaikan dan juga penurunan. Jumlah wisatawan paling banyak terjadi pada Bulan Juni 2018 dengan jumlah 114.044 dan jumlah wisatawan paling sedikit terjadi pada Bulan Februari 2019 dengan jumlah 12.584.

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Wana Wisata BKPH Sengguruh**KPH Malang Januari 2018 s/d Juni 2019**

No.	Nama wana wisata	Harga karcis (Rp)	Jumlah Pengunjung		Keterangan
			orang	rupiah	
1.	Pantai Regent	7.500	510.000	3.213.000.000	Januari 2018 – Desember 2018
2.	Pantai Regent	7.500	153.000	1.147.500.000	Januari 2019 – Juni 2019

Sumber : Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan BKPH Sengguruh, 2019

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa jumlah wisatawan pada tahun 2018 berjumlah 510.000 dan tidak ada perbedaan yang terlalu jauh dengan data dari PD. Jasa Yasa. Pantai Balekambang dan Pantai Regent merupakan 1 lokasi, 1 kawasan, serta 1 loket. Walaupun berbeda nama akan tetapi pengelolaan pantai tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Tabel 11. Laporan Keamanan Kawasan Pantai

No.	Tahun	Korban	Keterangan
1	Awal 2018	Nama : Eko Endoyo Jenis kelamin : laki-laki Lahir : Mojokerto Kel/Desa : Kedungjati Kecamatan : Kabuh Kabupaten : Jombang Agama : Islam Pekerjaan : Petani	Meninggal dunia

Sumber : Dokumen LMDH Wononadi, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas menunjukan bahwa terjadi pertukaran informasi berupa kecelakaan laut di sekitar pantai di awal tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 belum ada korban.

Berdasarkan pemaparan data diatas menunjukan bahwa terjadinya sebuah proses informasi yang saling menguntungkan antara PD. Jasa Yasa dan Perhutani kepada pimpinan masing-masing. Walaupun terdapat 1 pintu loket 2 pengelola para pengelola tersebut tetap saling bekerjasama dalam hal informasi apapun yang terdapat di lingkungan wisata pantai. Informasi tersebut berupa informasi penjualan tiket, jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 serta keamanan lingkungan wisata.

b. Adanya pertukaran kegiatan

Pengembangan pariwisata alam di suatu daerah diperlukan kerjasama oleh berbagai pihak untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama tersebut dapat berupa suatu perencanaan kegiatan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan. Menurut Suwanto (2004:88) dalam penyelenggaraan perusahaan pariwisata alam dibebani kewajiban yang mengarah kepada pembatasan kerusakan lingkungan, serta kewajiban untuk menjaga dan melestarikan obyek wisata alam seperti yang tertuang pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1994 salah satunya yaitu menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung serta turut menjaga kelestarian fungsi kawasan alam. Berikut ini daftar personel kegiatan para aktor dalam menjaga keamanan dan menjaga kebersihan. Berikut ini datanya :

**Tabel 12. Daftar Personel Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan
di Pantai Wisata Balekambang
Koramil 0818/12 Bantur TA. 2019**

No.	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1.	Suparian	Pelda	31930715071272	Bati Tuud
2.	Endy Setya Budi	Pelda	21990109721278	Bati Kamsos
3.	Suilono	Sema	3920224630471	Babinsa
4.	Untung Subagyo	Serda	31940149360972	Babinsa
5.	Sugeng Widodo	Serda	31950196521275	Babinsa
6.	Bukhori	Serma	3920752480571	Babinsa
7.	Slamet	Serda	627049	Babinsa
8.	Hadi Sunarko	Sertu	31940566550574	Babinsa
9.	Eddy Waluyo	Sertu	31980308131276	Bamin Tuud
10.	Didin suhaminto	Serda	31010200590181	Babinsa
11.	Heddy H.S	Koptu	31960521080974	Babinsa
12.	Mahfud Khusaini	Koptu	31000254970779	Babinsa
13.	Eko Wandoyo	Kopka	31950124560874	Babinsa
14.	Harmowo	Pelda	624352	Inteldim 0818
15.	Tupa Holong S	Serda	3910243560771	Inteldim 0818

Sumber : Dokumen PD.Jasa Yasa, 2019

**Tabel 13. Daftar Piket Harian Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH Wononadi)**

SENIN		SELASA	
1.	WAWAN	1.	MULYONO
2.	SILIR	2.	MAR'IN
3.	WANTO	3.	KUSNADI
RABU		KAMIS	
1.	KASMARI	1.	NURYANTO
2.	SUW'IN	2.	HARI S.
3.	NGATELIM	3.	KARLAN
JUM'AT		SABTU	

1.	SUYUT	1.	MARWI
2.	SUNA'IN	2.	GONO
3.	SUTIONO	3.	SUPARMAN

Sumber : Dokumen LMDH Wononadi, 2019

**Tabel 14. Daftar Piket Malam Minggu Lembaga Masyarakat
Desa Hutan (LMDH Wononadi)**

I		II	
1.	WANTO	1.	MAR'IN
2.	HARI S.	2.	MAR'WI
3.	MULYONO	3.	SUNA'IN
4.	SUTIONO	4.	GONO
		5.	SUWI'IN
III		IV	
1.	KASMARI	1.	SILIR
2.	WAWAN	2.	NGATELIM
3.	KARLAN	3.	KUSNADI
4.	SUYUT	4.	NURYANTO
		5.	SUPARMAN

Sumber : Dokumen LMDH Wononadi, 2019

Berkaitan dengan hal tersebut dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Balekambang terdapat sebuah perencanaan yaitu pertukaran kegiatan seperti kebersihan dan keamanan yang dilakukan oleh Perhutani melalui LMDH Wononadi untuk menjaga fungsi kelestarian fungsi kawasan alam serta PD.Jasa Yasa melalui Koramil Bantur untuk mengamankan di lingkungan wisata. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan setiap hari apalagi waktu menjelang malam pergantian tahun baru, pasca lebaran dan liburan sekolah. Perhutani sebagai pengawas kelestarian alam seperti kebersihan serta pengawasan pohon-pohon yang berpotensi tumbang dan Koramil Bantur untuk menjaga keselamatan para wisatawan selama berada di pantai. kegiatan tersebut

tentunya bertujuan untuk membuat wisatawan merasa aman dan nyaman selama berada pada lingkungan Pantai Balekambang.

c. Adanya berbagi sumber daya

Menurut Sunaryo (2013:64) yang menjadi penentu dari tingkat kondisi daya dukung lingkungan dalam suatu destinasi pariwisata salah satunya adalah daya dukung sumber daya lokal yaitu daya dukung lingkungan yang berupa ketersediaan sumberdaya lokal di destinasi, baik yang berupa: tenaga kerja, sumber pendanaan, penyediaan lahan maupun peran aktif para pelaku usaha kepariwisataan dari masyarakat setempat. Para pengelola wisata Pantai Balekambang yaitu PD. Jasa Yasa berbagi sumber daya melalui lingkup internal dengan cara mengadakan studi banding ke Pulau Dewata untuk menambah wawasan dan meniru dalam rangka pengembangan wisata Pantai Balekambang semakin baik salah satunya membangun fasilitas pendukung yang dibutuhkan wisatawan. Seperti fasilitas selfie, flying fox.



Gambar 10. Salah satu spot selfie di Pantai Balekambang
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2019



Gambar 11. Spot Selfie di pintu masuk Pantai Balekambang
 Sumber : Dokumentasi peneliti, 2019



Gambar 12. Terdapat wisatawan yang sedang menikmati ayunan di Pantai Balekambang
 Sumber : Dokumentasi peneliti, 2019



Gambar 13. Salah satu spot selfie yang ada di Pantai Balekambang
 Sumber : Dokumentasi peneliti, 201

Selain itu pada pihak Perhutani cara untuk melakukan berbagi sumber daya yaitu dengan cara bagi hasil pendapatan dengan masyarakat yang disebut dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dimana hasil pendapatan tersebut salah satunya membangun sebuah penginapan untuk mendukung fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan.



Gambar 14. Salah satu penginapan yang berada di Pantai Balekambang milik LMDH Wononadi binaan Perhutani
 Sumber : Dokumen peneliti, 2019

Sumber daya di Pantai Balekambang dapat dikatakan maju karena terdapat berbagai campur tangan para aktor dalam bekerja sama dengan masyarakat. Salah satunya yaitu peran aktif para pelaku usaha kepariwisataan dari masyarakat setempat dengan cara membangun fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh para wisatawan seperti spot selfie dan adanya penginapan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar pantai untuk membuka jasa penginapan, *tour guide* atau *travel* kepada wisatawan. Adanya berbagai sumber daya yang dilakukan oleh lembaga masyarakat desa hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara menyediakan jasa berupa sarana penginapan untuk para wisatawan dapat membuat wisatawan tertarik mengunjungi Pantai Balekambang.

d. Meningkatkan kapasitas orang lain untuk mencapai tujuan bersama

Kapasitas merupakan kemampuan yang dikembangkan dengan memperhatikan pada sumber daya manusia. PD. Jasa Yasa membangun kapasitas pada lingkungan sekitar Pantai Balekambang dipusatkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi kepada para pedagang dan pemilik warung di Pantai Balekambang untuk mengembangkan di wisata Pantai Balekambang menjadi lebih baik dan diminati oleh para pengunjung. Seperti sosialisasi dalam rangka menyambut HUT RI Ke 74 juga sosialisasi tentang penataan parkir roda 2, roda 4, elf, dan Bus dengan membuat peraturan tentang batas lahan parkir kendaraan dengan bibir pantai. Penataan parkir tersebut bertujuan agar wisatawan merasa nyaman, tertib dan tidak terjadi polusi udara maka dari itu dipusatkan di

deket pintu masuk loket tepatnya di sebelah kanan kantor UPT Pantai Balekambang dan dibatasi dengan pagar kayu.



Gambar 15. Larangan tentang batas parkir kendaraan
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2019

Hal yang sama juga diterapkan oleh pihak Perhutani bekerjasama dengan masyarakat yaitu membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan. Menurut Sunaryo (2013:202) pelatihan yang dimaksud dengan pelatihan SDM dalam pengertian ini adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori.



Gambar 16. Pembinaan LMDH Wononadi di pendopo Regent Balekambang
Sumber : Arsip Perhutani, 2019

Pembinaan tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali serta menyambut event besar seperti malam tahun baru, liburan hari raya dan libur sekolah. Pembinaan tersebut seperti pembinaan tentang keamanan wisatawan terkait dengan pohon-pohon yang sudah masanya ditebang dan ranting pohon yang rawan tumbang maka dipotong oleh para anggota LMDH Wononadi tentunya atas ijin dari pihak Perhutani.

Penjelasan diatas menunjukan adanya berbagi kapasitas antara Perhutani dan PD. Jasa dengan masyarakat sekitar Pantai Balekambang. Hal itu dapat menjadikan sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan karena semua aktor ikut terlibat dalam mengelola serta mengembangkan wisata di Pantai Balekambang. Jika mereka akan terus berkolaborasi tentunya dapat mendongkrak wisatawan untuk terus berkunjung ke Pantai Balekambang dan pendapatan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kolaborasi Antar Aktor Dalam Manajemen Pariwisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang

a. Faktor pendukung

1) Faktor internal

a) Faktor program kerja Pemerintah Kabupaten Malang

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode Tahun 2016–2021. Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) misi salah satunya yaitu mengembangkan pariwisata. Salah satu program yang sekarang sedang berjalan yaitu Malang Beach Festival. Program tersebut dilaksanakan dan diikuti oleh beberapa dinas dan didukung oleh PD. Jasa Yasa dan Perhutani sebagai pemberi ijin karena kawasan Pantai yang berada di Kabupaten Malang merupakan wewenang dari pihak perhutani.

b) Faktor aktor

Aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Balekambang yaitu PD. Jasa Yasa dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Malang, Perhutani bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang beranggotakan dari masyarakat sekitar. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Eshetu dalam Supriadi (2016:2) dalam proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata dibutuhkan peran pemerintah, masyarakat, swasta, maupun dunia usaha untuk bekerjasama membuat strategi maupun solusi yang tepat dalam menangani masalah yang ada agar terselesaikan.

c) Faktor Geografis

Berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia pada wilayah selatan dapat memberikan faktor pendukung bagi wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang. Berbagai macam flora dan fauna dapat kita temui. Seperti hasil tangkapan laut yaitu cumi-cumi, gurita, ikan cakalang dan ikan tuna yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, kondisi topografi dari bagian tengah Kabupaten Malang berupa dataran tinggi yang dikelilingi beberapa gunung menyebabkan iklim di Malang lumayan dingin. Hal tersebut dapat menarik wisatawan karena cuaca yang tidak terlalu panas untuk berwisata.

2) Faktor eksternal

a) Faktor tradisi atau budaya masyarakat

Menurut Sunaryo (2013:64) faktor yang bisa menjadi penentu dari tingkat kondisi daya dukung lingkungan dalam suatu destinasi pariwisata salah satunya adalah daya dukung budaya. Karakteristik dan ketahanan sosial-budaya dari suatu destinasi wisata memiliki peran yang sangat menentukan dalam menyerap dampak dari kunjungan wisatawan ke destinasi tersebut. Pantai Balekambang merupakan satu-satunya pantai di Kabupaten Malang yang memiliki pura seperti di Tanah Lot Pulau Bali. Selain untuk menarik wisatawan, pura tersebut untuk tempat persembayangan umat Hindu pada hari raya Nyepi. Tradisi tersebut dinamakan dengan tradisi Jalani Dipuja yang diikuti oleh umat Hindu di Malang raya bahkan juga dari Bali. Selain itu juga terdapat tradisi malam tahun baru yang merupakan tradisi tahunan dari wisatawan yang datang ke Pantai Balekambang. Tradisi tersebut berasal dari ide masyarakat sendiri bekerjasama dengan PD.Jasa

Yasa dengan membuat Pulau Ismoyo yang ada puranya di beri *lighting* yang menjadikan pura tersebut seakan-akan hidup pada malam hari.



Gambar 17. Tradisi upacara Jalani Dipuja di Pantai Balekambang

Sumber : Dokumen PD. Jasa Yasa, 2019



Gambar 18. Pesta Kembang Api di Pulau Ismoyo di Pantai Balekambang

Sumber : Dokumen PD. Jasa Yasa, 2019

b) Faktor sumber daya manusia

Menurut Sunaryo (2013:200) yang dimaksud dengan sumber daya manusia pariwisata adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan. Sumber daya manusia sekitar Pantai Balekambang dapat dikatakan maju karena selain terdapat warung, mereka juga mendirikan sebuah inovasi seperti pada jaman sekarang yaitu cafe. Selain itu juga mereka membuat berbagai macam kreativitas cenderamata untuk memberikan suatu khas wisata Pantai Balekambang. Selain sumber daya dari masyarakat, terdapat juga faktor pendukung sumber daya manusia dari pengelola baik itu dari PD.Jasa Yasa atau perhutani. Mereka mendirikan sebuah inovasi sarana pendukung seperti spot selfie atau ayunan untuk wisatawan yang berkunjung ke Pantai Balekambang.



Gambar 19. Berbagai macam kreativitas cenderamata di Pantai Balekambang

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2019